

**Pengaruh *Good Corporate Governance*,
Karakteristik Perusahaan dan Ukuran KAP Terhadap *Fee Audit*
Pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di OJK Tahun 2015-
2019**

Fanny Faradilla Frenchischa

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Al-Azhar Indonesia

Syurmita

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Al-Azhar Indonesia

ABSTRACT

This study aims to analyze the factors that influence the determination of audit fees at Islamic commercial banks registered with the Otoritas Jasa Keuangan (OJK). The factors tested in this study were independent commissioners, audit committee, firm size, size of KAP, intensity of board meetings, and intensity of audit committee meetings. The sample was selected using purposive sampling method and obtained 58 samples. The data used is secondary data, which comes from the Indonesia Stock Exchange website. Data in the form of annual reports are obtained through internet access on the respective official company websites. The analysis used is descriptive statistics, classical assumption test, and multiple linear regression. The results of the study indicate that the audit committee and company size have a significant relationship to audit fees. However, independent commissioners, size of KAP, intensity of board of commissioners meetings, and intensity of audit committee meetings do not have a significant effect on audit fees.

Keywords: *independent commissioners, audit committee, firm size, size of KAP, intensity of board of commissioner meetings, intensity of audit committee meetings, and audit fees.*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Mayoritas penduduk yang beragama Islam menjadikan Indonesia sebagai pasar yang potensial dalam pengembangan keuangan syariah, salah satunya sudah mulai berkembang pesat bank-bank yang kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip syariah. Menurut (Statistik Perbankan Syariah per Desember 2019) mencatat bahwa jumlah Bank Umum Syariah (BUS) sebanyak 14 bank, jumlah Unit Usaha Syariah (UUS) sebanyak 20, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebanyak 166 bank dan jaringan kantor sebanyak 2.654. Pada dasarnya bank mempunyai peranan besar dalam mengendalikan ekonomi suatu negara. Kemajuan ekonomi bank di suatu negara dapat menjadi tolak ukur kemajuan negara.

Seiring dengan makin tingginya kebutuhan akan perbankan syariah, maka Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dikeluarkan yang secara spesifik mengatur bagaimana perbankan dengan prinsip syariah beroperasi di Indonesia. Seperti yang ditulis Fianti dalam (Kompasiana, 2020) saat perbankan nasional diprediksi akan mengalami depresi akibat pandemi covid-19, bank syariah justru memiliki kelebihan dengan konsep bagi hasilnya untuk bisa satu level lebih kokoh dalam menghadapi krisis.

Seluruh perusahaan wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) sebelum dipublikasikan kepada publik. Para pengguna laporan keuangan menginginkan laporan keuangan yang bermutu, sehingga hal ini memotivasi para akuntan untuk lebih meningkatkan kualitas laporan yang akan mereka audit. Semakin besar perusahaan semakin membutuhkan hasil audit laporan keuangan yang berkualitas, mengakibatkan semakin banyak akuntan publik yang berusaha untuk meningkatkan kualitas hasil audit mereka.

Beberapa kasus yang ditemukan yang berakibat buruk terhadap kualitas audit. Salah satunya adalah kasus yang terdapat di Indonesia, yaitu terjadi pada PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk pada tahun 2019 pasalnya dalam laporan keuangan Garuda ditemukan kejanggalan. Kasus dari Garuda Indonesia ini tidak hanya berdampak pada maskapai penerbangan Garuda Indonesia saja. Auditor laporan keuangan, yakni Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumapea Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan (Member of BDO Internasional), juga dikenakan sanksi oleh Menteri Keuangan.

Hal yang perlu mendapat perhatian auditor selama proses pengauditan yakni ukuran perusahaan dan tingkat kompleksitas yang berbeda-beda. Untuk mengatasi perbedaan kepentingan dan masalah agensi yang timbul, perusahaan dapat menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Peran GCG yang baik sebagai salah satu bentuk keandalan pelaporan keuangan perusahaan tentunya juga akan mempengaruhi besar kecilnya *fee* audit yang dibayarkan.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *fee* audit telah dilakukan oleh beberapa penelitian sebelumnya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Chandra (2015), menyimpulkan bahwa dewan komisaris, ukuran perusahaan, anak perusahaan, dan ukuran KAP memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *fee* audit. Sedangkan faktor-faktor lain yaitu independensi dewan komisaris, jumlah dewan komisaris, rapat komite audit, dan risiko perusahaan tidak berpengaruh terhadap *fee* audit. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan

oleh Rukmana, et al (2017), yang menyatakan bahwa risiko litigasi, ukuran perusahaan, dan karakteristik auditor berpengaruh dalam menentukan besar kecilnya audit *fee*. Sedangkan kompleksitas, proporsi komisaris independen, proporsi komite audit independen, dan jenis industri klien tidak mempengaruhi jumlah audit *fee*.

Penelitian yang dilakukan oleh Cristansy dan Ardiati (2016), menjelaskan bahwa ukuran perusahaan, dan ukuran KAP berpengaruh signifikan terhadap besarnya *fee* audit. Sedangkan kompleksitas perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap besarnya *fee* audit. Menurut penelitian Hasan (2017), menyakaan bahwa kompleksitas audit, profitabilitas klien, ukuran perusahaan, dan ukuran KAP berpengaruh signifikan terhadap *fee* audit. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Shafira dan Ghozali (2017), menyimpulkan bahwa risiko audit dan manajemen laba tidak berpengaruh signifikan terhadap *fee* audit. Sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *fee* audit.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Prawira (2017), menjelaskan bahwa ukuran dewan komisaris dan ukuran komite audit berpengaruh, sedangkan dewan komisaris independen, rapat dewan komisaris, komite audit independen, keahlian komite audit, rapat komite audit, dan kesulitan keuangan tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap *fee* audit. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sukaniasih dan Tenaya (2016), menyimpulkan bahwa independensi dewan komisaris, independensi komite audit dan manajemen laba tidak memiliki pengaruh signifikan, sedangkan ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, dan intensitas pertemuan komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap *fee* audit.

Masalah dalam menentukan *fee* audit yang dilakukan oleh auditor masih banyak terjadi dalam suatu pelaporan keuangan. Hingga saat ini masalah penentuan *fee* audit masih menjadi topik yang sangat menarik untuk diteliti pada perbankan syariah.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang serta penelitian terlebih dahulu yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap *fee* audit?
2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *fee* audit?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *fee* audit?
4. Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap *fee* audit?
5. Apakah intensitas pertemuan dewan komisaris berpengaruh terhadap *fee* audit?
6. Apakah intensitas pertemuan komite audit berpengaruh terhadap *fee* audit?

II. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Teori Keagenan

Pemisahan pemilik dan manajemen di dalam literatur akuntansi disebut teori keagenan. Teori keagenan mendasarkan hubungan kontrak antara pemegang saham dengan manajer perusahaan. Teori keagenan menjelaskan hubungan keagenan antara dua pihak dimana pihak *principal* mempekerjakan pihak *agent* untuk

melaksanakan jasa atas nama mereka yang melibatkan pendelegasian wewenang pembuat keputusan kepada *agent* (Jensen, M.C and Meckling, 1976).

Teori agensi menyatakan bahwa konflik kepentingan dan asimetris informasi yang muncul dapat dikurangi dengan mekanisme pengawasan yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan berbagai pihak di perusahaan. Mekanisme pengawasan yang dimaksud adalah *corporate governance*. Pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan pada peraturan dan ketentuan yang berlaku. Upaya pengawasan ini menimbulkan *agency cost*. *Agency cost* merupakan ongkos atau risiko yang terjadi ketika *principal* membayar seorang *agent* untuk menjalankan sebuah tugas, padahal kepentingan *agent* tidak selalu selaras dengan kepentingan *principal*. Hal ini mendorong *agent* untuk melakukan tindakan-tindakan agar sesuai dengan kepentingan *principal*, salah satunya adalah dengan membayar *fee* audit eksternal yang lebih tinggi untuk mendapatkan kualitas audit yang lebih tinggi seperti yang dikehendaki oleh *principal* (Hapsari dan Laksito 2013).

2.2. *Good Corporate Governance*

Menurut peraturan (Bank Indonesia, 2009) nomoe 11/33/PBI/2009 *Good Corporate Governance* adalah suatu tata kelola menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, professional. Menurut Nasrum (2018) *Corporate Governance* merupakan sebuah hubungan system yang terdiri dari sruktur dan proses.

Di Indonesia pedoman akan mekanisme GCG disusun oleh (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006). Menurut KNKG, GCG merupakan pola hubungan, sistem, serta proses yang digunakan organ perusahaan (direksi, komisaris) guna memberi nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders*. Dengan adanya GCG perusahaan dapat melakukan pengelolaan berdasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan.

GCG di Indonesia secara implisit maupun eksplisit telah diatur dalam beberapa undang-undang dan peraturan. Di sektor perbankan, Bank Indonesia telah mempunyai Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* di Bank Umum, serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006. Penerapan prinsip-prinsip GCG menjadi suatu keharusan bagi sebuah institusi, termasuk didalamnya institusi bank syariah.

2.3. Dewan Komisaris

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) dewan komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melakukan *good corporate governance*. Berdasarkan pedoman Governance (2006) dewan komisaris memiliki fungsi pengawasan yang antara lain, pertama dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedua anggota dewan komisaris baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri berhak mempunyai akses dan

memperoleh informasi tentang perusahaan secara tepat waktu dan lengkap. Ketiga menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan perusahaan oleh direksi.

Komposisi keanggotaan dewan komisaris dapat terdiri dari komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi atau dikenal sebagai komisaris independen dan komisaris terafiliasi. Komisaris terafiliasi adalah komisaris yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain, atau dengan perusahaan itu sendiri. Sedangkan komisaris independen atau komisaris tidak terafiliasi merupakan anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semena-mena demi kepentingan perusahaan (FCGI, 2001)

2.4. Komisari independen

Menurut peraturan (Bank Indonesia, 2009) Nomor 1/33/PBI/2009 dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dengan bank sehingga dapat mendukung kemampuan untuk bersikap independen. Komisaris independen harus bebas dari kepentingan dan urusan dan bisnis apapun atau hubungan yang dapat atau secara wajar dapat dianggap sebagai campur tangan secara material dengan kemampuannya sebagai seorang komisaris untuk bertindak demi kepentingan yang menguntungkan perusahaan.

Berdasarkan *Task Force* KNKG, fungsi dan peran komisaris independen dalam meningkatkan prinsip-prinsip GCG tergambar dalam misi komisaris independen. Adapun misi komisaris independen yang pertama adalah mendorong dan menempatkan kesetaraan (*fairness*) diantara berbagai kepentingan termasuk kepentingan perusahaan dan kepentingan *stakeholders* sebagai prinsip utama dalam pengambilan keputusan oleh dewan komisaris. Serta misi komisaris independen yang kedua adalah mendorong diterapkannya prinsip dan praktek tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) pada perusahaan di Indonesia.

2.5. Komite Audit

Komite audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris dan melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan tugas dewan komisaris. Menurut Ikatan Komite Audit Indonesia (2006) mendefinisikan komite audit sebagai suatu komite yang bekerja dengan cara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris atau dewan pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan.

2.6. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan (*Company Size*) merupakan besar kecilnya perusahaan klien yang sedang diaudit oleh auditor atau KAP. Ukuran perusahaan adalah suatu

skala atau nilai dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan berdasarkan total asset, *log size*, nilai pasar saham dan lain-lain. Besar kecilnya perusahaan akan mempengaruhi kemampuan dalam menanggung resiko yang mungkin timbul dari berbagai situasi yang dihadapi perusahaan.

Semakin besar perusahaan, maka semakin dikenal oleh masyarakat yang artinya semakin mudah untuk mendapatkan informasi yang akan meningkatkan nilai perusahaan. Bahkan perusahaan besar yang memiliki total aset dengan nilai aset yang cukup besar dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Semakin besar suatu perusahaan maka cenderung pengguna dana eksternal juga semakin besar.

2.7. Ukuran Kantor Akuntan Publik

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik mengakui IAPI sebagai organisasi profesi akuntan publik yang berwenang melaksanakan ujian sertifikasi akuntan publik, penyusunan dan penerbitan standar profesional dan etika akuntan publik, serta menyelenggarakan program pendidikan berkelanjutan bagi seluruh akuntan public di Indonesia.

Pada Buku Direktorat Ikatan Akuntansi Indonesia tahun 2011, IAI mengklasifikasikan KAP yang beroperasi di Indonesia menjadi dua, yaitu :

1. KAP yang melakukan kerjasama dengan KAP asing.
2. KAP yang tidak melakukan kerjasama dengan KAP asing.

2.8. Fee Audit

Mulyadi (2002), menjelaskan bahwa besarnya *fee* profesional anggota dapat bervariasi tergantung antara lain: risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya. Kompleksitas jasa yang dimaksud adalah kompleksitas perusahaan menyangkut ukuran perusahaan dan banyaknya anak perusahaan. Semakin kompleks klien, semakin sulit untuk mengaudit dan membutuhkan waktu yang lebih lama pula sehingga *fee* audit pun semakin tinggi.

2.9. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Fee Audit

Corporate governance secara khusus diimplementasikan melalui dewan komisaris dan dewan direksi. Komisaris independen yang terpisah dari pihak manajemen mempunyai tanggung jawab utama untuk mengawasi kinerja manajemen. Hal ini akan mengurangi penaksiran risiko yang dilakukan oleh auditor yang mengarah kepada *fee* audit yang lebih rendah.

Rukmana et al (2017) menyatakan keberadaan komisaris independen akan membantu meringankan pekerjaan auditor independen. Hal tersebut akan meminimalisir tingkat kesalahan dan kecurangan yang terjadi dalam perusahaan sehingga penaksiran risiko dan prosedur pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor independen dapat dikurangi. Hal tersebut berdampak pada penetapan *fee* audit yang lebih rendah.

H₁: Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap *fee* audit.

2.10. Pengaruh Komite Audit terhadap *Fee Audit*

Salah satu komponen *good corporate governance* adalah komite audit. Komite audit dapat melindungi kepentingan *stakeholder* dari penyalahgunaan wewenang yang dimiliki oleh pihak manajemen. Berdasarkan Peraturan Nomor IX.I.5 Keputusan Ketua Bapepam LK Nomor KEP-643/BL/2012, dimana perusahaan wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan, hal ini bertujuan untuk mempermudah komite audit dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya yaitu mengawasi proses pelaporan keuangan.

Yulio (2016) menyatakan semakin besar ukuran komite audit tentunya akan menuntut kualitas audit yang tinggi sehingga akan memilih auditor dari KAP besar dan komite audit memastikan bahwa proses audit berjalan dengan baik sampai tercapainya tingkat kualitas yang diinginkan sehingga biaya yang dibebankan dalam *fee* audit akan semakin tinggi.

H₂: Komite audit berpengaruh signifikan terhadap *fee* audit.

2.11. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Fee Audit*

Perbankan syariah merupakan emiten yang cukup dilihat oleh para investor dalam Otoritas Jasa Keuangan. Perbankan syariah memiliki peluang yang besar dalam memberi kesempatan kepada investor untuk berinvestasi, dalam menentukan laporan keuangan, karena didalam laporan keuangan terdapat data yang dapat menggambarkan kinerja maupun kondisi pada perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin besar pula *fee* yang akan dibayarkan oleh perusahaan untuk auditor.

H₃: Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *fee* audit.

2.12. Pengaruh Ukuran KAP Terhadap *Fee Audit*

KAP yang besar akan memiliki citra yang baik dimata publik, untuk menjaga citra tersebut maka diperlukan kinerja yang baik dalam hal ketepatan waktu penyelesaian laporan audit tanpa mengurangi kualitas laporan itu sendiri. Pada Buku Direktorat Ikatan Akuntansi Indonesia (2011), IAI mengklasifikasikan KAP yang beroperasi di Indonesia menjadi dua, yaitu KAP yang melakukan kerjasama dengan KAP asing, dan KAP yang tidak melakukan Kerjasama dengan KAP asing.

H₄: Ukuran KAP berpengaruh signifikan terhadap *fee* audit.

2.13. Pengaruh Intensitas Pertemuan Dewan Komisaris Terhadap *Fee Audit*

Intensitas pertemuan dewan komisaris memiliki kontribusi dalam keefektifan fungsi pengawasan proses pelaporan keuangan. Dan dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris akan mengurangi kemungkinan terjadinya masalah keagenan yaitu pertemuan pemilik (*principal*) dan pihak manajemen (*agent*). Kinerja dari dewan komisaris dalam mengawasi dan memberikan nasihat kepada direksi perusahaan dapat dilihat dari intensitas pertemuan yang dilakukan dalam satu tahun buku.

H₅: Intensitas pertemuan dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap *fee* audit.

2.14. Pengaruh Intensitas Pertemuan Komite Audit Terhadap *Fee Audit*

Intensitas pertemuan komite audit adalah jumlah rapat yang diadakan oleh komite audit dalam setahun guna membahas masalah-masalah yang terdapat di perusahaan. Pengadaan rapat yang sering dilakukan oleh komite audit bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di perusahaan sehingga dapat mendiskusikannya dengan auditor eksternal. Hal ini akan mengurangi pekerjaan auditor sehingga *fee audit* juga akan menurun.

Chandra (2015), menyatakan komite audit yang sering mengadakan rapat akan lebih mengetahui mengenai masalah-masalah yang terdapat dalam perusahaan sehingga dapat mengkomunikasikan permasalahan tersebut kepada auditor eksternal. Hal ini akan mengurangi pekerjaan auditor sehingga *fee audit* juga akan menurun.

H₆: Intensitas pertemuan komite audit berpengaruh signifikan terhadap *fee audit*.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Metode Pengumpulan Data

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi dokumentasi dengan melihat komisaris independen, komite audit, ukuran perusahaan, ukuran KAP, intensitas pertemuan dewan komisaris, dan intensitas pertemuan komite audit. Data diperoleh dengan mengakses *website* Otoritas Jasa Keuangan serta *website* masing-masing perusahaan.

Metode penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, dengan kriteria sebagai berikut :

1. Perusahaan perbankan syariah (BUS) yang tercatat hingga Desember 2020, di Otoritas Jasa Keuangan.
2. Perusahaan perbankan yang menyajikan laporan keuangan yang telah diaudit secara rutin, konsisten, dan lengkap menyesuaikan dengan kebutuhan variabel penelitian.
3. Perusahaan perbankan syariah yang memiliki data lengkap pada laporan keuangan dan laporan tahunan yang digunakan dalam penelitian.
4. Perusahaan perbankan syariah yang mengungkapkan besaran *fee audit* pada laporan tahunan.
5. Perusahaan perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama tahun 2015-2019 yang melakukan kerja sama dengan KAP asing akan diberi nilai 1. Sedangkan yang tidak melakukan kerja sama dengan KAP asing akan tetap dimasukkan dalam sampel penelitian dan akan diberi nilai 0.

3.2. Metode Analisis Data

Pengujian terhadap hipotesis dalam penelitian ini menggunakan *Multiple Regression Analysis* (MRA). Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran teoritis yang telah ada sebelumnya, maka terbentuklah model yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu:

$$Y = a + b_1DK + b_2KA + b_3SIZE + b_4KAPit + b_5BODMEET + b_6ACMEET + e.....$$

Keterangan:

Y	= <i>Fee Audit</i>
a,	= Konstanta
b ₁ b ₂ b ₃ b ₄ b ₅ b ₆	= Koefisien Regresi Variabel Independen
DK	= Komisaris Independen
KA	= Komite Audit
SIZE	= Ukuran Perusahaan
KAPit	= Ukuran KAP
BODMEET	= Intensitas Pertemuan Dewan Komisaris
ACMEET	= Intensitas Pertemuan Komite Audit

Definisi Operasi Variabel dan Pengukuran

1. Komisaris Independen
Komposisi keberadaan komisaris independen terhadap jumlah seluruh dewan komisaris.
$$DK = \frac{\text{Jumlah komisaris independen}}{\text{Jumlah dewan komisaris}}$$
2. Komite Audit
Jumlah komite audit setidaknya adalah 3 orang dimana salah satunya memiliki kualifikasi dalam bidang akuntansi dan atau keuangan.
$$KA = \frac{\text{Komite audit yang memiliki kualifikasi akuntansi/keuangan}}{\text{Jumlah komite audit}}$$
3. Ukuran Perusahaan
Ukuran perusahaan digunakan untuk membedakan antara perusahaan besar dan perusahaan kecil yang dapat dilihat dari total aset yang dimiliki.
$$SIZE = \log \text{ natural of total assets}$$
4. Ukuran KAP
Mengindikasikan KAP yang melakukan kerja sama dengan KAP asing dan KAP yang tidak melakukan kerja sama dengan KAP asing.
Variabel dummy, diukur menggunakan angka 1 = untuk KAP yang melakukan kerja sama dengan KAP asing, dan angka 0 = untuk KAP yang tidak melakukan kerja sama dengan KAP asing.
5. Intensitas Pertemuan Dewan Komisaris
Jumlah pertemuan yang dilakukan oleh anggota dewan komisaris dalam satu tahun.
6. Intensitas Pertemuan Komite Audit
Jumlah pertemuan anggota komite audit dalam satu tahun.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Analisis Data

4.1.1. Statistik Deskriptif

Pada bagian ini akan digambarkan atau dideskripsikan dari data masing-masing variabel yang telah diolah. Statistik deskriptif keseluruhan variabel penelitian dapat dilihat dari nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*) dan standard deviasi.

Tabel 4.1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DK	58	.3333	.7500	.593391	.0956637
KA	58	.2000	.5714	.341830	.0823134
SIZE	58	661912.00	112291867.00	23853577.3	26695163.4
KAPit	58	0	1	.97	.184
BODMEET	58	2	34	10.95	6.866
ACMEET	58	3	37	12.72	7.063
FEE AUDIT	58	70000000	3547000000	1052362153	949104413.3
Valid N	58				

Tabel 4.2. Hasil Uji Frekuensi KAPit

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0	2	3.4	3.4
	1	56	94.9	100.0
	Total	58	98.3	100.0
Total	58	100.0		

4.1.2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang dilakukan pada penelitian ini terdiri atas uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas, dari seluruh uji asumsi klasik yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Uji Normalitas dalam penelitian ini dilihat dari hasil uji *Kolmogorov Smirnov* dan uji normal p-plot. Dari hasil uji *Kolmogorov Smirnov* menunjukkan asymp. Sig. (2-tailed) hasil uji menunjukkan nilai 0.200 yang dimana berada lebih besar dari 0.05 yang mendukung data berdistribusi normal. Selain itu, dilihat dari grafik kedua model normal P-Plot bahwa data mengikuti garis linier yang

ditunjukkan dengan titik-titik yang tidak jauh dari garis, sehingga residual berdistribusi normal.

- b. Uji Multikolinieritas menunjukkan bahwa data bebas dari multikolinieritas karena *tolerance* > 0.10 dan nilai VIF < 10. Berdasarkan data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas dalam model regresi penelitian ini.
- c. Uji Autokorelasi pada penelitian ini diuji menggunakan uji *Run-Test*. Dari hasil uji *Run-Test* menunjukkan asymp. Sig. (2-tailed) hasil uji menunjukkan nilai 0.064 yang dimana berada lebih besar dari 0.05 yang mendukung data berdistribusi normal.
- d. Uji Heteroskedastisitas pada penelitian ini diuji menggunakan *scatterplot*. Data dalam penelitian ini digambarkan dengan titik-titik yang menyebar. Hal ini menandakan tidak terdapat heteroskedastisitas karena tidak terdapat pola yang jelas serta titik-titik yang menyebar.

4.1.3. Uji Hipotesis Uji Statistik t

Statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Untuk melihat ada tidaknya pengaruh dari masing-masing variabel independen. Jika nilai probabilitas statistik $t > 0.05$ maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak. Jika nilai probabilitas statistik $t \leq 0.05$ maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Jika nilai t hitung lebih besar dari t tabel maka koefisien regresi adalah signifikan sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima.

Dalam penelitian ini diketahui bahwa nilai t tabel dengan $df = n - k - 1 = 58 - 5 - 1 = 52$ maka nilai t tabel diperoleh sebesar 1,67.

Tabel 4.3 Hasil Uji Hipotesis Uji Statistik t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized coefficients Beta	T	Sig
	B	Std. Error			
Constant	-1114334489	872055951		-1.278	.207
DK	-19432.432	99014.153	-.024	.196	.845
KA	598765.594	134844.134	.525	4.400	.000
SIZE	.165	.039	.463	4.268	.000
KAPit	432570663.87	544247497	.084	.795	.430
BODMEE T	-21151026.96	190830887	-.153	-1.108	.273
ACMEET	-26483315.30	17967456.9	-.197	-1.474	.147

Hasil uji statistik t dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel komisaris independent memiliki nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$, dimana $-0.196 < 1.67$ dengan tingkat signifikansi $0.845 > 0.05$ sehingga dapat dinyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap variabel *fee* audit.
2. Variabel komite audit memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dimana $4.44 > 1.67$ dengan tingkat signifikansi $0.000 < 0.05$ sehingga dapat dinyatakan bahwa komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap variabel *fee* audit.

3. Variabel ukuran perusahaan memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dimana $4.268 > 1.67$ dengan tingkat signifikansi $0.000 < 0.05$ sehingga dapat dinyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel *fee* audit.
4. Variabel ukuran KAP memiliki nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ dimana $0.795 < 1.67$ dengan tingkat signifikansi $0.43 > 0.05$ sehingga dapat dinyatakan bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap variabel *fee* audit.
5. Variabel intensitas pertemuan dewan komisaris memiliki nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ dimana $-1.108 < 1.67$ dengan tingkat signifikansi $0.273 > 0.05$ sehingga dapat dinyatakan bahwa intensitas pertemuan dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap variabel *fee* audit.
6. Variabel intensitas pertemuan komite audit memiliki nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ dimana $-1.474 < 1.67$ dengan tingkat signifikansi $0.147 > 0.05$ sehingga dapat dinyatakan bahwa intensitas pertemuan komite audit tidak berpengaruh terhadap variabel *fee* audit.

=

4.1.4. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R^2 terletak antara 0 sampai dengan 1. ($0 \leq R^2 \leq 1$). Tujuan menghitung koefisien determinasi adalah untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R^2 pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.4. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.685 ^a	.469	.407	731006339

Berdasarkan tabel 4, menunjukkan bahwa besarnya nilai Adjusted *RSquare* adalah 0.407 atau 40.7 persen. Hal ini menunjukkan bahwa 40.7 persen variabel *fee* audit dapat dijelaskan oleh enam variabel komisaris independen (DK), komite audit (KA), ukuran perusahaan (SIZE), ukuran KAP (KAPit), intensitas pertemuan dewan komisaris (BODMEET), dan intensitas pertemuan komite audit (ACMEET). Sedangkan sisanya 59.3 persen dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak disertakan dalam penelitian ini.

4.1.5. Uji Signifikansi Pengaruh Simultan (Uji F)

Uji statistik F bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh secara bersama-sama antara variabel-variabel dependen (*fee* audit). Uji F dilakukan dengan membandingkan besarnya F_{hitung} dengan F_{tabel} atau dapat pula dengan melihat probabilitasnya.

Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95% dan tingkat signifikansi 0.05, df_1 = jumlah variabel independen - 1 = 6 - 1 = 5 dan df_2 (n-k-1) atau 58 - 1 - 1 = 56, maka diperoleh F_{tabel} sebesar 2.39. Nilai Uji F pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.5. Hasil Uji Statistik F

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	240926700	6	4015445	7.514	.000 ^b
Residual	2752883614	51	534370266		
Total	51345553679	57			

Berdasarkan tabel 4.5, diperoleh F_{hitung} sebesar 7.514 dan F_{tabel} sebesar 2.39 atau dengan kata lain F_{hitung} lebih besar daripada F_{tabel} dan nilai signifikansi sebesar 0.000 lebih kecil dari 0.05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel komisaris independen, komite audit, ukuran perusahaan, ukuran KAP, intensitas pertemuan dewan komisaris, dan intensitas pertemuan komite audit secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen *fee* audit.

4.2. PEMBAHASAN

4.2.1. Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Fee Audit*

Komisaris independen diukur dengan membandingkan jumlah komisaris independen dengan total dewan komisaris perusahaan. Komisaris independen yang terpisah dari pihak manajemen memiliki tugas untuk mengawasi kinerja manajemen, termasuk mengawasi pelaporan keuangan. Keberadaan komisaris independen memiliki tujuan untuk mewujudkan objektivitas independensi, kewajaran, serta dapat memberikan keseimbangan antara kepentingan pemegang saham mayoritas dan juga perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas, bahkan sampai pada kepentingan *stakeholders* lainnya. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) dewan komisaris adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan telah melakukan *good corporate governance*.

Surat keputusan IAPI nomor KEP.024/IAPI/VII/2008 tentang basis penetapan *fee* audit menyatakan bahwa dalam menetapkan imbal jasa (*fee*) audit, Akuntan Publik harus mempertimbangkan kebutuhan klien, tugas dan tanggung jawab menurut hukum, independensi, tingkat keahlian, waktu, serta basis penetapan *fee* audit. Basis penetapan *fee* audit ditentukan berdasarkan kesepakatan antara KAP dengan komite audit perusahaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *fee audit*. Tabel 4.10, menunjukkan nilai koefisien beta yang dihasilkan adalah -19432,432, dengan tingkat signifikansi 0,845. Karena tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dikatakan bahwa hipotesis ditolak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Rukmana, et al (2017), dan Chandra (2015). Hasil penelitian mereka menemukan bahwa independensi dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap *fee* audit. Menurut Chandra (2015), semakin banyak dewan komisaris independen yang dimiliki perusahaan belum tentu akan menurunkan *fee* audit. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukaniasih dan Tenaya (2016), menyatakan komisaris independen berpengaruh terhadap *fee* audit. Hal ini dikarenakan pada perusahaan *governance* yang kuat cenderung mencari jasa audit dengan kualitas yang lebih baik untuk melindungi nama baik perusahaan dan melindungi kekayaan pemegang saham. Kualitas audit yang tinggi menuntut *fee* audit yang lebih tinggi pula.

4.2.2. Pengaruh Komite Audit terhadap *Fee Audit*

Komite audit bertugas mensupervisi proses laporan keuangan dan memonitor hubungan manajemen perusahaan dan eksternal auditornya. Karena berhubungan langsung dengan auditor eksternal, tentunya komite audit akan berpengaruh langsung terhadap penentuan *fee* audit. Komite audit bertanggung jawab atas perekrutan, pemecatan, dan pemberian kompensasi kepada auditor eksternal. Demi mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas tinggi, komite audit tentunya mengawasi kinerja auditor eksternal dan mengawasi apakah prosedur audit telah dilakukan dengan benar sesuai standar atau belum. Komite audit menginginkan auditor yang berkualitas pula sehingga komite audit akan berpengaruh positif terhadap *fee* audit. Menurut FCGI (2001), pada umumnya Komite Audit mempunyai tanggung jawab pada tiga bidang yaitu laporan keuangan, tata kelola perusahaan dan pengawasan perusahaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran komite audit berpengaruh signifikan terhadap *fee audit*. Tabel 4.10, menunjukkan nilai koefisien beta yang dihasilkan adalah 598765,594, dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dikatakan bahwa hipotesis diterima.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Yulio (2016) dalam penelitiannya yang menemukan bahwa semakin tinggi jumlah komite audit perusahaan maka akan semakin tinggi pula *fee* audit yang dibayarkan. Karena semakin besar ukuran komite audit dan semakin banyak komite audit yang memiliki keahlian akuntansi/keuangan tentunya akan menuntut kualitas audit yang tinggi sehingga akan memilih auditor dari KAP besar dan komite audit memastikan bahwa proses audit berjalan dengan baik sampai tercapainya tingkat kualitas yang diinginkan sehingga biaya yang dibebankan dalam *fee* audit akan semakin tinggi.

Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukianasih dan Tenaya (2016) dan Prawira (2017). Sukianasih dan Tenaya (2016), yang menyatakan bahwa ukuran komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *fee* audit. Artinya intensitas kerja auditor eksternal akan berkurang seiring dengan meningkatnya jumlah komite audit dalam memperbaiki kualitas pelaporan keuangan.

4.2.3. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Fee Audit*

Ukuran perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan jumlah aset yang dimiliki perusahaan. Auditor yang melakukan pekerjaan audit pada perusahaan besar membutuhkan waktu dan jumlah tim audit yang lebih banyak dibanding dengan mengaudit perusahaan kecil karena perusahaan besar memiliki transaksi yang lebih banyak. Sehingga semakin besar perusahaan mengindikasikan total aset yang dimilikinya akan berdampak pada meningkatnya *fee* audit yang dibebankan kepada perusahaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *fee audit*. Tabel 4.10, menunjukkan nilai koefisien beta yang dihasilkan adalah 0,165, dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dikatakan bahwa hipotesis diterima.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Cristansy dan Ardiati (2016), Shafira dan Ghozali (2017), Hasan (2017), Chandra (2015), dan Rukmana, et al (

2017). Penelitian tersebut membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *fee* audit. Menurut Chandra (2015), auditor yang melakukan pekerjaan audit pada perusahaan besar membutuhkan waktu yang lebih lama dan jumlah tim yang lebih banyak dibandingkan dengan mengaudit perusahaan kecil karena perusahaan besar memiliki transaksi yang lebih banyak dan lebih kompleks. Jadi semakin sebesar ukuran perusahaan maka semakin tinggi *fee* audit yang akan dibebankan kepada perusahaan.

Hal tersebut sejalan dengan Shafira dan Ghozali (2017) yang menyatakan bahwa perusahaan yang lebih besar pada umumnya memiliki sumber daya yang lebih besar yang memungkinkan perusahaan tersebut untuk memberikan audit *fee* yang lebih besar dari perusahaan kecil. Selain itu, dengan adanya tuntutan yang tinggi dan diimbangi dengan imbalan *fee* yang sesuai dapat memotivasi auditor untuk meningkatkan kinerjanya sehingga menyelesaikan tugasnya sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Penelitian tentang pengaruh ukuran perusahaan yang lainnya menurut Rukmana, et al (2017) juga menunjukkan adanya ukuran perusahaan terhadap *fee* audit yang dibayarkan, karena semakin besar ukuran perusahaan yang dihadapi maka akan semakin banyak waktu yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan pemeriksaan sehingga *fee* audit yang ditetapkan akan semakin tinggi.

4.2.4. Pengaruh Ukuran KAP terhadap *Fee Audit*

Berdasarkan data hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap *fee* audit. Hal ini disebabkan pertanggung jawaban seorang auditor tidak hanya terhadap perusahaan yang menggunakan jasa auditnya, tetapi juga terhadap masyarakat luas. Sehingga seorang akuntan publik dituntut untuk objektif dan profesional dalam memberikan jasanya, demi menjaga netralitas laporan keuangan yang disajikan dan meningkatkan kepercayaan *stakeholder* terhadap informasi laporan keuangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap *fee audit*. Tabel 4.10, menunjukkan nilai koefisien beta yang dihasilkan adalah 432570663,87, dengan tingkat signifikansi 0,430. Karena tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dikatakan bahwa hipotesis ditolak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Chandra (2015), yang menyatakan bahwa perusahaan yang menggunakan KAP yang lebih baik dalam hal ini KAP yang berafiliasi dengan KAP asing tidak menjamin besaran *fee* audit akan lebih tinggi. Hasil penelitian ini juga konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu Suharli dan Nurlaelah (2008) yang mengungkapkan bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap *fee* audit. Hal ini dikarenakan penelitian ini terlalu banyak menggunakan KAP yang melakukan kerja sama dengan KAP asing daripada KAP yang tidak melakukan kerja sama dengan KAP asing.

Namun, hasil penelitian tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Cristansy dan Ardiati (2016) dan Hasan (2017), yang menyatakan bahwa ukuran KAP berpengaruh terhadap *fee* auditor eksternal. Hal ini dikarenakan pada umumnya perusahaan memilih menggunakan jasa auditor dari Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk meningkatkan kredibilitas dari laporan keuangan tersebut. Perusahaan yang tidak menggunakan jasa auditor kemungkinan besar akan

memiliki laporan keuangan dengan tingkat kredibilitas yang sangat kecil. Dalam memilih mempekerjakan auditor untuk memberikan jasa audit, perusahaan memiliki pandangan, jika diaudit oleh kantor akuntan publik yang besar dan memiliki hubungan kerja sama dengan kantor akuntan publik asing, maka akan menghasilkan penilaian yang lebih baik dimata *stakeholders*.

4.2.5. Pengaruh Intensitas Pertemuan Dewan Komisaris terhadap *Fee Audit*

Dewan komisaris independen yang terpisah dari pihak manajemen memiliki tugas untuk mengawasi kinerja manajemen, termasuk mengawasi pelaporan keuangan. Dengan intensitas pertemuan dewan komisaris yang tinggi menunjukkan bahwa fungsi *corporate governance* di perusahaan sudah berjalan baik sehingga hal ini akan mengurangi penaksiran risiko oleh auditor eksternal yang akan berdampak pada penurunan *fee audit*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa intensitas pertemuan dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap *fee audit*. Tabel 4.10, menunjukkan nilai koefisien beta yang dihasilkan adalah -21151026,96, dengan tingkat signifikansi 0,273. Karena tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dikatakan bahwa hipotesis ditolak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Chandra (2015), yang menyatakan bahwa dewan komisaris memiliki tugas untuk mengawasi kinerja manajemen, termasuk mengawasi pelaporan keuangan. Dengan intensitas pertemuan dewan komisaris yang tinggi menunjukkan bahwa fungsi *corporate governance* di perusahaan sudah berjalan baik sehingga hal ini akan mengurangi penaksiran risiko oleh auditor eksternal yang akan berdampak juga terhadap penurunan *fee audit*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa intensitas pertemuan dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *fee audit*. Hal ini dikarenakan bahwa dewan komisaris yang independen dan sering mengadakan rapat akan menambah fungsi internal *governance* dan *environment control* serta mengurangi penilaian risiko oleh auditor terhadap proses pelaporan keuangan sehingga berpengaruh terhadap *fee auditor* yang lebih rendah.

4.2.6. Pengaruh Intensitas Pertemuan Komite Audit terhadap *Fee Audit*

Sesuai dengan peraturan Bapepam, komite audit akan mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam tiga bulan. Secara umum, struktur komite audit yang baik akan memperkuat fungsi pengawasan dalam perusahaan. Namun, dalam penelitian ini tidak terbukti bahwa komite audit yang sering mengadakan rapat akan meningkatkan fungsi pengawasan perusahaan. Rapat yang dilakukan komite audit bisa tidak mempengaruhi pengawasan perusahaan jika yang dibahas dalam rapat komite audit bukan isu-isu permasalahan perusahaan. Yang terpenting dalam rapat adalah kualitas rapat bukan jumlah rapat yang diadakan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa intensitas pertemuan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *fee audit*. Tabel 4.10, menunjukkan nilai koefisien beta yang dihasilkan adalah -26483315,3, dengan tingkat signifikansi 0,147. Karena tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dikatakan bahwa hipotesis ditolak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Chandra (2015), yang menyatakan bahwa komite audit yang sering mengadakan rapat akan lebih mengetahui masalah-masalah yang terdapat dalam perusahaan sehingga dapat mengkomunikasikan

permasalahan tersebut kepada auditor eksternal. Komunikasi komite audit akan membantu proses audit yang dilakukan oleh auditor eksternal karena auditor eksternal mengetahui permasalahan apa yang menjadi perhatian khusus pada perusahaan. Hal ini akan mempengaruhi *fee* audit.

Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Sukianasih dan Tenaya (2016), yang menyatakan bahwa intensitas pertemuan komite audit berpengaruh terhadap *fee* audit. Hal ini dikarenakan peningkatan *fee* audit kemudian terjadi akibat tambahan waktu yang diminta oleh auditor dalam menyiapkan laporan untuk memenuhi undangan pertemuan dengan *staf* komite audit. Dengan demikian semakin banyak waktu yang dipergunakan auditor eksternal untuk mengikuti pertemuan dengan komite audit dalam rangka meningkatkan kualitas pelaporan keuangan maka akan memengaruhi besaran *fee* audit yang lebih tinggi pula.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pengujian hipotesis variabel komisaris independen terhadap *fee audit* dengan nilai signifikansi sebesar 0,845. Karena tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan pada komisaris independen terhadap *fee* audit. Komisaris independen yang terpisah dari pihak manajemen memiliki tugas untuk mengawasi kinerja manajemen, termasuk mengawasi pelaporan laporan keuangan. Adanya pengawasan dari komisaris independen akan berdampak pada laporan keuangan yang baik. Hal ini dapat mengurangi penaksiran risiko yang dilakukan oleh auditor, sehingga akan mempengaruhi *fee audit*. Oleh karena itu, ukuran dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap *fee audit*.

Berdasarkan pengujian hipotesis variabel komite audit terhadap *fee audit* dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pada komite audit terhadap *fee* audit. Semakin besar komite audit dan semakin banyak komite audit yang memiliki kualifikasi akuntansi/keuangan tentunya akan menuntut kualitas audit yang tinggi sehingga akan memilih auditor dari KAP besar dan komite audit akan memastikan bahwa proses audit berjalan dengan baik sampai tercapainya tingkat kualitas yang diinginkan sehingga biaya yang dibebankan dalam *fee audit* akan semakin tinggi. Oleh karena itu, ukuran komite audit berpengaruh terhadap *fee audit*.

Berdasarkan pengujian hipotesis variabel ukuran perusahaan terhadap *fee audit* dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pada ukuran perusahaan terhadap *fee* audit. Dapat dikatakan bahwa semakin besar ukuran suatu perusahaan maka pekerjaan audit pada perusahaan tersebut akan membutuhkan waktu yang lebih lama dan jumlah tim audit yang lebih banyak dibandingkan mengaudit perusahaan kecil. Hal ini karena perusahaan besar memiliki transaksi yang lebih banyak dan lebih kompleks, sehingga *fee audit* yang dikeluarkan akan semakin tinggi. Oleh karena itu, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *fee audit*.

Berdasarkan pengujian hipotesis variabel ukuran KAP terhadap *fee audit* dengan nilai signifikansi sebesar 0,430. Karena tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan pada ukuran KAP

terhadap *fee audit*. Perusahaan yang menggunakan KAP yang bekerja sama dengan KAP asing tidak menjamin kualitas audit dan *fee audit* akan lebih tinggi begitupun sebaliknya. Oleh karena itu, ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap *fee audit*.

Berdasarkan pengujian hipotesis variabel intensitas pertemuan dewan komisaris terhadap *fee audit* dengan nilai signifikansi sebesar 0,273. Karena tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan pada intensitas pertemuan dewan komisaris terhadap *fee audit*. Hal ini dikarenakan bahwa dewan komisaris yang independen dan sering mengadakan rapat akan menambah fungsi internal *governance* dan *environment control* serta mengurangi penilaian risiko oleh auditor terhadap proses pelaporan keuangan sehingga berpengaruh terhadap *fee audit* yang lebih rendah. Oleh karena itu, intensitas pertemuan dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *fee audit*.

Berdasarkan pengujian hipotesis variabel intensitas pertemuan komite audit terhadap *fee audit* dengan nilai signifikansi sebesar 0,147. Karena tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan pada intensitas pertemuan komite audit terhadap *fee audit*. Secara umum, struktur komite audit yang baik akan memperkuat fungsi pengawasan dalam perusahaan. Namun, dalam penelitian ini tidak terbukti bahwa komite audit yang sering mengadakan rapat akan meningkatkan fungsi pengawasan perusahaan. Rapat yang dilakukan komite audit bisa tidak mempengaruhi perusahaan jika yang dibahas dalam rapat komite audit bukan isu-isu permasalahan perusahaan. Yang terpenting dalam rapat adalah kualitas rapat bukan banyaknya jumlah rapat yang diadakan. Oleh karena itu, intensitas pertemuan komite audit tidak berpengaruh terhadap *fee audit*.

Beberapa keterbatasan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jumlah sampel hanya dari satu perusahaan perbankan yaitu Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
2. Karena di Indonesia sendiri pengungkapan besarnya *fee audit* dalam laporan keuangan masih berupa *voluntary disclosure*, maka untuk mengukur *fee audit* digunakan *professional fee*. Namun, peneliti belum dapat memastikan apakah hanya *fee audit* saja yang kurang termasuk kedalam *professional fee* sehingga memungkinkan hasil yang didapat kurang merepresentasikan besarnya *fee audit* yang sesungguhnya.
3. Koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) dalam penelitian ini adalah sebesar 40% sedangkan sisanya 60% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model penelitian. Hal ini berarti masih ada variabel lain yang perlu diidentifikasi untuk menjelaskan faktor yang mempengaruhi penetapan *fee audit*.
4. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya terbatas pada komisaris independen, komite audit, ukuran perusahaan, ukuran KAP, intensitas pertemuan dewan komisaris dan intensitas pertemuan komite audit, sehingga penjelasan dari variabel dependen tidak sepenuhnya dapat digambarkan oleh variabel independen.

5.2. Saran

Bagi penelitian selanjutnya, dapat memperbanyak jumlah sampel penelitian yang tidak hanya terbatas pada Bank Umum Syariah, melainkan dapat memperluas objek penelitian pada UUS maupun BPRS yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan dapat pula menggunakan bank Syariah negara lain.

Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat menambah jumlah variabel independen penelitian, atau mungkin mengganti dengan variabel independen lain yang dapat mempengaruhi variabel dependen, sehingga dapat menjelaskan variabel independen dengan lebih baik.

Bagi penelitian selanjutnya, sebaiknya menggunakan sampel penelitian yang mencantumkan data tentang *fee audit* daripada data mengenai *professional fee* dalam laporan keuangan sehingga lebih menggambarkan data *fee audit* yang lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnes, Sawir (2008). *Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Arens et.al (2012). *Auditing and Assurance Services: An Intregated Approach* (Fourteen). Prentice Hall.
- Bank Indonesia (2006). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia (2006). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum*.
- Bank Indonesia (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*.
- Bank Indonesia (2009). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*.
- Bapepam-LK Nomor IX.I.5. *Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit Nomor IX.I.5*. (Online).
<http://komiteaudit.org/home/index.php/regulasi/179-peraturan-bapepam-lk-no-ix-i-5/>. Diakses pada 22 Maret 2021.
- Chandra, marcella octavia (2015). *Jurnal Akuntansi Bisnis*, Vol. XIII No. 26 Maret 2015. *Pengaruh Good Corporate Governance, Karakteristik Perusahaan Dan Ukuran Kap Terhadap Fee Audit Eksternal*, XIII(26), 174–194.
- Cristansy, J., & Ardiati, A. Y (2016). Pengaruh kompleksitas perusahaan, ukuran perusahaan, dan ukuran kap terhadap fee audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bei tahun 2012-2016. *Modus*, 30(2), 198–211.
- Eisenhart, K. (1989) *Agency Theory: An Assesement and Review Academy of Management Review*.
- FCGI (2001). *Seri Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance)*, Edisi ke-2. Jakarta.
- Freycinetia, F (2020).
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20200805/9/1275284/mana-yang-lebih-parah-pdb-saat-krisis-corona-atau-krismon-1998->

- Ghozali, Imam (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta.
- Hapsari, E. D., & Laksito, H (2013). Pengaruh Fungsi Audit Internal Terhadap Fee Auditor Eksternal. *Diponegoro Journal of Accounting*, 0(0), 748–757.
- Hasan, M. A (2017). Pengaruh Kompleksitas Audit, Profitabilitas Klien, Ukuran Perusahaan dan Ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap Audit Fee. *Pekbis Jurnal*, 9(3), 214–230.
- IAPI (2008). *Surat Keputusan Ketua Umum IAPI SK KEP.024/IAPI/VII/2008 tentang Kebijakan Penentuan Fee*. Tanggal 2 Juli 2008. Jakarta.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (2011). *Standar Profesional Akuntan Publik*. Salemba Empat.
- Ikatan Komite Audit Indonesia (2006). *Manual Komite Audit*. Jakarta: IKAI.
- Jensen, M.C and Meckling, W (1976). *Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure*. *Journal of Financial Economics*, V.3, No.4, Available from: <http://papers.ssrn.com>.
- Liyudza, Linda. (2013) *Pengaruh Biaya Agensi Terhadap Asimetri Informasi (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2011)*.
- Martin, P (2019). <https://money.kompas.com/read/2019/06/28/122000726/auditor-laporan-keuangan-garuda-dibekukan-selama-12-bulan>.
- Mulyadi (2002). *Auditing*. Edisi Ke Enam. Buku 1. Salemba Empat. Jakarta.
- Nasrum, M (2018). *Corporate Governance (Konsep, Teori dan Aplikasi di Beberapa Negara Asia)*. 1–162. <https://doi.org/10.31227/osf.io/zpfnx>.
- Nur, F. (2020) <https://www.kompasiana.com/ulvia/5e761b57097f3608226d6802/analisis-dampak-lockdown-covid-19-sebuah-kontemplasi-mendalam-pertaruhan-ekonomi-vs-kesehatan?page=all>.
- Otoritas Jasa Keuangan (2015). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit*.
- Otoritas Jasa Keuangan (2019). *Statistik Perbankan Syariah Desember 2019*. <http://www.ojk.go.id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankansyariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember2019/SPS%25Desember%252019>. Diakses pada 20 Maret 2020.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik, (2008).
- Prawira, F. I (2017). Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Kesulitan Keuangan terhadap Fee Audit pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014. *JOM Fekon*, 4, No.1(1), 1–13.
- Rukmana, M., Konde, Y. T., & Setiawaty, A (2017). Karakteristik Auditor Terhadap Audit Fee pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XX*.
- Sejarah Perbankan Syariah, dalam <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/sejarah-perbankan-syariah.asp>. (2019).

- Shafira, A. R., & Ghozali, I (2017). Pengaruh Risiko Audit, Ukuran Perusahaan, dan Manajemen Laba terhadap Fee Audit. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6, Nomor 3(1), 1–8.
- Sugiyono (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono (2017). *Statistik Untuk Penelitian*. Alfabeta.
- Suharli, M., & Nurlaelah (2008). Konsentrasi Auditor Dan Penetapan Fee Audit : Investigasi Pada Bumn. *JAAI*, 12 No.2, 133–148.
- Sukaniasih, N., & Tenaya, A (2016). Pengaruh Komposisi Dewan Komisaris, Karakteristik Komite Audit, Dan Manajemen Laba Terhadap Fee Audit. *E-Jurnal Akuntansi*, 15(3), 2161–2187.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, (2011).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, (2011).
- Yatim, et al. (2006). *Governance Structures, Ethnicity, and Audit Fees of Malaysian Listed Firms*.
- Yulio, W. S (2016). Pengaruh Konvergensi IFRS, Komite Audit, dan Kompleksitas Perusahaan terhadap Fee Audit. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, XV No.29, 77–92.
- Zarkasyi (2008). *Good Corporate Governance Pada Badan usaha Manufaktur, Perbankan , dan Jasa Keuangan Lainnya (Kesatu)*. Alfabeta.